



PENINGKATAN INTEGRASI RISET DAN INOVASI DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN NOVASI DAERAH KABUPATEN SIKKA

Selviana Evarista Misa¹, Imanuel Wellem², Viktor Eko Transilvanus³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: selvy_evarista@icloud.com

Abstrack

The integration of research and innovation in regional development policy is an important aspect of realizing effective, adaptive, and evidence-based planning. However, in practice, the utilization of research results in the policy formulation process at the regional level has not been optimal, causing policies to be frequently formulated based on intuition, experience, or administrative considerations alone. This condition is also found at the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPPERIDA) of Sikka Regency, which has a strategic role in coordinating regional planning, research, and innovation. This study aimed to analyze the level of integration of research and innovation with regional development policies, identify inhibiting factors, and formulate strategies to enhance integration in a more effective and sustainable manner. The theoretical review of this study refers to the concepts of organizational integration, research as a basis for decision-making, public innovation, and the regional innovation system approach. The method used was a descriptive qualitative approach conducted through internship activities, with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and literature review. Data were analyzed descriptively by comparing empirical conditions with the established conceptual framework. The results of the study show that integration has been implemented through the alignment of research with regional planning documents, facilitation of cross-sector collaboration among regional agencies and universities, and the utilization of several research outputs for policy formulation.

Nevertheless, obstacles remain, including limitations in human resources, budget, research infrastructure, cross-sector coordination, and the suboptimal innovation culture. Therefore, strengthening regulations, improving institutional capacity, developing an innovation ecosystem, and integrating research data systems are required to ensure that development policies are more targeted and sustainable. Overall, the

integration of research and innovation plays an important role in improving the quality of regional development governance in Sikka Regency.

Keywords: *Research Integration, Regional Innovation, Development Policy, BAPPERIDA, Evidence-Based Policy*

Abstrak

Integrasi riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Namun, pada praktiknya, pemanfaatan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan di tingkat daerah masih belum optimal, sehingga kebijakan sering kali disusun berdasarkan intuisi, pengalaman, atau pertimbangan administratif semata. Kondisi tersebut juga ditemukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan integrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian teoritis penelitian ini mengacu pada konsep integrasi organisasi, riset sebagai dasar pengambilan keputusan, inovasi publik, serta pendekatan sistem inovasi daerah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan magang dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi empiris dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi telah berjalan melalui penyelarasan riset dengan dokumen perencanaan daerah, fasilitasi kolaborasi lintas perangkat daerah dan perguruan tinggi, serta pemanfaatan beberapa hasil riset untuk penyusunan kebijakan. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur riset, koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya budaya inovasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan ekosistem inovasi, serta integrasi sistem data penelitian agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, integrasi riset dan inovasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Kata kunci: integrasi riset, inovasi daerah, kebijakan pembangunan, BAPPERIDA, evidence-based policy.

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam era pembangunan berbasis pengetahuan (knowledge-based development), peran riset dan inovasi menjadi semakin penting sebagai dasar dalam

perumusan kebijakan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi antara hasil riset, inovasi, dan kebijakan pembangunan daerah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi mendorong penguatan sistem riset dan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Perubahan kelembagaan yang mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dengan fungsi riset dan inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida/Bapperida) merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah didukung oleh kajian ilmiah dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Kabupaten Sikka sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah menjadi sangat penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada data, kajian ilmiah, dan solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya integrasi antara riset, inovasi, dan kebijakan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya penelitian di tingkat daerah, belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dalam proses perencanaan pembangunan, serta masih terbatasnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam ekosistem inovasi daerah. Kondisi ini menyebabkan potensi riset dan inovasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan integrasi antara

riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. Penguatan integrasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis bukti sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Data Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

	Judul	Gab	
	Dinas / OPD Pelaksana	Hasil	Keterangan
	Politeknik Cristo Re – Maumere	MELUKIS (Mesin Peluruh Jagung Cristo Re untuk Sikka)	Direkomendasikan
	UPT. Puskesmas Nanga	JOIN dari BUDI (Jaga Orang Ini Dari Bunuh Diri)	-
	Badan Pendapatan Daerah	TEGOR DD (Tekan Dan Gedor, <i>Door To Door</i>)	-
	Pusat Inovasi Sikka-BAPPERIDA	MANISINAMON (Coklat Kayu Manis)	-
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CINTA PANAS (Cetak dan Terbitkan Akta Perkawinan)	-
	PKBM Bisa Ngaisiang	LAPOR SEKOLAH (Layanan Pendidikan untuk Anak Putus Sekolah)	Direkomendasikan
	UPT. Puskesmas Kewapante	POLANDIA (Posyandu Lansia di Rumah)	Direkomendasikan
	UPT Puskesmas Tanarawa	GELI HATI (Gerakan Peduli Ibu Hamil Beresiko Tinggi)	Direkomendasikan
	Universitas Muhammadiyah Maumere	<i>Autoplant by Trio Smartfarmers</i> (Sistem Penyiraman Otomatis)	-
	UPT. Puskesmas Hewokloang	PI-KOPI-SAHIT (Pergi Ketok Pintu Sahabat Hipertensi)	Direkomendasikan
	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Pertanahan	SISKOORDINAT (Sistem Koordinasi Data Informasi Tepadu)	-
	Universitas Muhammadiyah Maumere	<i>SMART POULTRY HOUSE</i> (Solusi Modern Otomatis Kandang Ayam)	Direkomendasikan
	Dinas Pertanian	RUANG HA-NYA (Konsultasi Online Hama dan Penyakit)	Direkomendasikan

	Judul	Gab	
	Dinas / OPD Pelaksana	Hasil	Keterangan
		Tanaman)	
	UPT. Puskesmas Waipare	GERLITA (Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa)	Direkomendasikan
	UPT. Puskesmas Waipare	PMO (Pendamping Minum Obat)	-
	UPT. Puskesmas Waipare	PESONA HATI (Pelayanan Empati Sayang Orang Dengan HIV/AIDS, Hindari Penularan dan Kematian)	Direkomendasikan
	Universitas Muhammadiyah Maumere	FIRESAFE	-
	Badan Pendapatan Daerah	Voucher Parkir Digital	-
	BAPPERIDA Kabupaten Sikka	SIKKA RinTA (Riset dan Inovasi Terpadu)	Direkomendasikan
	Dinas Perpustakaan	Perpustakaan Digital Desa	-
	BAPPERIDA dan Pelaku UMKM Kabupaten Sikka	Inkubasi UMKM Inovatif	-
	BAPPERIDA Kabupaten Sikka	Klinik Proposal Inovasi Daerah	Direkomendasikan
	BAPPERIDA Kabupaten Sikka	Pendampingan Inovasi OPD	Direkomendasikan
	BAPPERIDA Kabupaten Sikka	Bank Data Penelitian Daerah	Direkomendasikan
	BAPPERIDA Kabupaten Sikka	Forum Inovator Daerah Sikka	Direkomendasikan
	BAPPERIDA Kabupaten Sikka	SIG Data Perencanaan Daerah	Direkomendasikan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, dapat diketahui bahwa jumlah inovasi daerah yang dihasilkan oleh perangkat daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah semakin meningkat. Peningkatan jumlah inovasi tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mulai mengoptimalkan pemanfaatan riset dan inovasi sebagai salah satu instrumen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif,

efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Kabupaten Sikka, inovasi daerah yang tercatat berasal dari berbagai perangkat daerah yang mengembangkan program dan kegiatan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, inovasi yang dihasilkan mencakup berbagai bidang, seperti bidang pelayanan publik, bidang tata kelola pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang pengembangan ekonomi daerah. Keberadaan inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya melakukan berbagai terobosan dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, jumlah inovasi yang berkembang di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa potensi pengembangan inovasi daerah cukup besar. Hal ini tidak terlepas dari peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi di tingkat daerah. Melalui berbagai program pembinaan dan fasilitasi inovasi, diharapkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.

Kecamatan Koting sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Sikka juga memiliki potensi dalam pengembangan inovasi daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dikembangkan melalui pendekatan inovasi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, integrasi antara riset, inovasi, dan kebijakan pembangunan daerah menjadi sangat penting agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah inovasi daerah belum sepenuhnya diikuti

dengan optimalnya implementasi dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam penyusunan kebijakan pembangunan, serta masih terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih terarah dalam memperkuat integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan inovasi daerah, di antaranya masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan inovasi, serta belum optimalnya dukungan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, serta meningkatkan dukungan pendanaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha, sehingga inovasi daerah yang dihasilkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Tinjauan Teori

Theory Stewardship

Dalam penelitian ini *grand theory* yang dipergunakan adalah teori *Stewardship*. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*). Sikap melayani merupakan suatu sikap yang

menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*). Penggunaan kekuasaan yang benar adalah dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan. Ini berarti pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan yang benar akan diterapkan.

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori *stewardship* memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan steward dan *principal* berbeda, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena steward lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi.

Teori ini menekankan pada peran pelaku UMKM sebagai pengelola sumber daya, baik keuangan, sumber daya manusia, maupun sumber daya alam, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berlandaskan *stewardship* akan melihat bagaimana UMKM mengelola sumber daya yang tersedia, bagaimana mereka berinteraksi dengan stakeholder, dan dampak pengelolaan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Integrasi

Integrasi berasal dari bangsa inggris “*integration*” yang berarti kesempurnaan atau Keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur. Yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial adalah tonggak penting dalam keberhasilan dan kestabilan masyarakat. Ini mengacu pada proses penyatuan beragam kelompok individu menjadi suatu kesatuan yang lebih besar, di mana perbedaan budaya,

nilai, dan latar belakang dapat berdampingan secara harmonis.

Andreas Harefa memberikan perspektif bahwa integrasi dapat diamati melalui tiga kunci utama, yaitu kejujuran dalam menggabungkan sistem, komitmen terhadap tujuan bersama, serta perilaku yang konsisten. Ketiga unsur ini menegaskan bahwa integrasi bukan hanya tentang menggabungkan unsur yang berbeda, tetapi juga memastikan bahwa penggabungan tersebut dijalankan dengan nilai, moralitas, dan konsistensi yang kuat. Tanpa ketiga kunci tersebut, integrasi mudah rapuh, karena perbedaan yang ada tidak diikat oleh landasan yang kokoh, Basri, *et al* (2019:23).

Pentingnya Integrasi

Integrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keterpaduan dan keselarasan dalam suatu sistem, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Secara umum, integrasi diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai komponen yang berbeda dapat bekerja bersama secara efektif menuju satu tujuan yang sama. Dalam konteks organisasi, integrasi menjadi dasar terciptanya koordinasi yang baik antarbagian, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan secara terpisah, tumpang tindih, atau bahkan saling bertentangan

Di BAPPERIDA Kabupaten Sikka, pentingnya integrasi tercermin dalam berbagai aspek pekerjaan, terutama dalam Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. BAPPERIDA berperan sebagai lembaga penggerak koordinasi antar perangkat daerah, sehingga semua program dan kegiatan dapat diarahkan sesuai dengan visi pembangunan daerah. Melalui forum lintas sektor, BAPPERIDA memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun telah terintegrasi antara bidang ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan terciptanya program pembangunan yang tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi saling mendukung dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi juga menjadi dasar bagi sinergi antara riset dan inovasi di BAPPERIDA. Hasil penelitian

yang dilakukan di tingkat daerah dapat langsung diimplementasikan dalam bentuk inovasi pelayanan publik.

Pengertian Riset

Secara etimologis, istilah “riset” berasal dari bahasa Inggris *research*, yang berarti “pencarian kembali” (*to search again*).

Riset atau istilah lainnya adalah penelitian. Ini merupakan sebuah kata dengan cakupan arti yang sangat luas. Pengertian riset atau penelitian ini sangat erat berhubungan dengan kajian pustaka, basis data, informasi, penulisan artikel, proses menganalisa data, dokumentasi, dan lain sebagainya. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa riset merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga menegaskan bahwa riset bukan sekadar aktivitas mencari informasi. Riset harus dilakukan dengan prosedur sistematis agar menghasilkan pengetahuan yang valid. Senada dengan itu, Gay dan Airasian (2012) memandang riset sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena.

Badan Pembangunan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, riset memiliki peranan penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Melalui riset, BAPPERIDA dapat mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan peluang pembangunan daerah secara lebih objektif dan berbasis data. Riset menjadi pijakan dalam merumuskan program dan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, riset tidak hanya menjadi kegiatan akademik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan inovasi di tingkat daerah. Dapat disimpulkan bahwa riset merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, dan terarah, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan atau teori baru. Riset menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembangunan karena melalui riset, kebijakan dan inovasi dapat dirancang berdasarkan fakta dan

data, bukan sekadar asumsi.

Inovasi

Inovasi secara umum diartikan sebagai suatu pembaharuan terhadap sumber daya yang telah ada sebelumnya. Pembaharuan tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti alam, energi, ekonomi, tenaga kerja, hingga penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi juga dipahami sebagai ide atau gagasan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya dan biasanya mengandung unsur terobosan dalam suatu bidang tertentu. Ide baru tersebut muncul dari proses kreatif inovator yang secara sadar melakukan penelitian, eksperimen, atau aktivitas terencana untuk menciptakan pembaharuan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat.

Andrew H. Van de Ven (1989) memberikan definisi bahwa inovasi merupakan proses pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh individu atau kelompok dalam kurun waktu tertentu melalui serangkaian aktivitas transaksi di lingkungan organisasi. Van de Ven menekankan bahwa inovasi bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses dinamis yang melibatkan pengembangan ide, pengujian, penerapan, hingga evaluasi dalam konteks organisasi. Pandangan ini menunjukkan bahwa inovasi memerlukan kerja sama, komunikasi, serta sistem organisasi yang mendukung agar gagasan baru dapat diwujudkan dan diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pembaharuan tersebut dapat berupa penyederhanaan proses kerja, perubahan mekanisme pelayanan, modifikasi kebijakan, dan berbagai bentuk transformasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi di sektor publik tidak semata-mata berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Integrasi Riset dan Inovasi Daerah

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan peran BRIN dalam mengendalikan pelaksanaan tugas BRIDA serta memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah. Peraturan ini mengatur mekanisme penyelenggaraan riset dan inovasi, mulai dari pembentukan BRIDA hingga pendampingan pemerintah daerah oleh BRIN. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, serta menyusun rencana induk dan peta jalan pemanfaatan iptek untuk mengatasi permasalahan prioritas daerah. Dengan demikian, regulasi ini menjadi dasar bagi tata kelola riset daerah yang lebih sistematis dan berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan.

Isi peraturan tersebut menekankan pentingnya dokumen perencanaan riset dan inovasi yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Dokumen itu harus mencakup potensi daerah, kondisi riset, tantangan pembangunan, tema prioritas riset, strategi, serta roadmap inovasi daerah. Selain itu, peraturan juga mengatur aspek SDM, pendanaan, sistem informasi, penghargaan, hingga pengawasan dan pelaporan. Keseluruhan regulasi ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti Hidayat (2024).

Metode

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam menganalisa masalah yang ada dengan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut (Risanaidah *et al.*, 2020) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis yang lebih mengutamakan proses dan makna. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka telah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang terarah dan terkoordinasi. BAPPERIDA Kabupaten Sikka menetapkan tema riset prioritas dengan mengacu pada kebutuhan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum koordinasi dan perencanaan. Peran BAPPERIDA sebagai koordinator dan fasilitator terlihat melalui penyelarasan kebutuhan riset OPD, fasilitasi kelembagaan, pengelolaan data, pendampingan teknis penelitian, serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil riset dan inovasi telah dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan, produk hukum daerah, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa proses integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang signifikan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya prosedur baku yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan regulasi daerah, sehingga integrasi masih bergantung pada kebutuhan dan inisiatif masing-masing OPD. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan belum sepenuhnya optimal akibat perbedaan prioritas, kepentingan, dan kapasitas antarinstansi, yang berdampak pada belum maksimalnya penyelarasan agenda riset dengan kebutuhan kebijakan pembangunan.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam kemampuan analisis kebijakan berbasis bukti dan penerjemahan hasil riset ke dalam rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Keterbatasan data yang belum terintegrasi secara optimal antar OPD, perbedaan format dan kualitas data, serta keterlambatan pembaruan informasi juga menjadi kendala dalam mendukung riset dan inovasi berbasis data. Di samping itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung turut membatasi ruang lingkup penelitian, keberlanjutan riset, serta uji coba dan replikasi inovasi di berbagai sektor dan wilayah.

Perbedaan orientasi dan kerangka waktu antara dunia riset dan proses perumusan kebijakan juga menjadi faktor penghambat, di mana penelitian membutuhkan waktu yang relatif panjang dan mendalam, sementara kebijakan daerah menuntut keputusan yang cepat dan praktis. Kondisi ini menyebabkan hasil riset lebih sering dimanfaatkan secara selektif dan konseptual dibandingkan sebagai dasar kebijakan yang bersifat langsung dan operasional.

Secara keseluruhan, meskipun integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka telah menunjukkan kemajuan yang positif, keberhasilannya masih memerlukan penguatan tata kelola riset dan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem data terintegrasi, serta komitmen kolaboratif yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, riset dan inovasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sistematis, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sikka.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka, dapat

ditarik beberapa kesimpulan penting terkait peningkatan integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah di BAPPERIDA Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut : telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan terarah. BAPPERIDA berperan strategis sebagai koordinator dan fasilitator dalam menetapkan tema riset prioritas yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, menyelaraskan kebutuhan riset dari berbagai OPD, serta memfasilitasi kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil riset dan inovasi yang telah dilakukan telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, produk hukum daerah, dan pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
2. Faktor yang menjadi penghambat adalah sebagai berikut : Hambatan utama yang diidentifikasi adalah belum adanya prosedur baku yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan regulasi daerah, sehingga proses integrasi masih sangat bergantung pada inisiatif dan kebutuhan masing-masing OPD. Koordinasi antarpemangku kepentingan juga belum berjalan optimal akibat perbedaan prioritas, kepentingan, dan kapasitas antarinstansi yang menyebabkan belum maksimalnya sinergi dalam pemanfaatan hasil riset. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam kemampuan analisis kebijakan berbasis bukti dan penerjemahan hasil riset ke dalam rekomendasi kebijakan yang aplikatif, turut menjadi kendala serius. Selain itu, sistem data yang belum terintegrasi secara optimal antar OPD dengan perbedaan format, kualitas data, dan keterlambatan pembaruan informasi mempersulit proses riset dan pemanfaatannya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung juga membatasi ruang lingkup penelitian, keberlanjutan riset, serta uji coba dan replikasi inovasi di berbagai sektor dan wilayah. Perbedaan orientasi dan kerangka

waktu antara dunia riset yang membutuhkan proses mendalam dan perumusan kebijakan yang menuntut keputusan cepat dan praktis menyebabkan hasil riset lebih sering dimanfaatkan secara konseptual dibandingkan sebagai dasar kebijakan yang langsung operasional.

3. Upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut : memperkuat regulasi dan kebijakan yang mewajibkan pemanfaatan hasil riset sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penelitian dan manajemen inovasi, membangun sistem data dan informasi riset yang terintegrasi (Satu Data Daerah), memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta masyarakat, menyediakan dukungan anggaran dan infrastruktur riset secara berkelanjutan, serta mengembangkan ekosistem dan budaya inovasi melalui forum koordinasi, inkubasi inovasi, dan diseminasi hasil penelitian agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala tentang analisis kebijakan berbasis bukti, pemanfaatan data riset, dan kemampuan menerjemahkan hasil penelitian ke dalam rekomendasi kebijakan yang operasional perlu diprioritaskan. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi antar OPD untuk mendukung riset dan inovasi berbasis data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses juga menjadi kebutuhan mendesak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang integrasi riset dan inovasi dengan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Riset

BAPPERIDA perlu menyusun prosedur baku atau regulasi internal yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan hasil riset dan inovasi ke dalam dokumen

perencanaan, produk hukum, dan kebijakan daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran riset sebagai dasar pengambilan keputusan dan mendorong pemanfaatan hasil penelitian secara sistematis oleh seluruh OPD.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Diperlukan penguatan kompetensi aparatur perencana dan pengelola kebijakan melalui pelatihan analisis kebijakan berbasis bukti, pemanfaatan data riset, dan penerjemahan hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas integrasi riset ke dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

3. Pengembangan Sistem Data Terintegrasi

BAPPERIDA disarankan membangun dan mengelola sistem data dan informasi yang terintegrasi antar OPD, dengan format data yang standar, kualitas data yang terjamin, serta pembaruan informasi secara berkala. Sistem data yang terintegrasi akan mempermudah akses, analisis, dan pemanfaatan riset sebagai dasar perencanaan dan inovasi.

Daftar Pustaka

- Akhmad Maskur, Akhmad Maskur. "Manajemen Integrasi Pendidikan Pondok Pesantren Dan Pendidikan Formal Studi Di Pondok Pesantren Ihya'ulumaddin Kesugihan, Cilacap." (2022).
- Akibu, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Integrasi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 107.
- Ali, M. (2024). Memahami riset perilaku dan sosial. Bumi Aksara.
- Amruddin, Ickhsanto Wahyudi, Darwin Damanik, Elidawaty Purba, Muhammad Umar, Wawan Ruswandi, Wenny Desty Febrian, Gede Cahyadi Putra, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti (2022) Metodologi Penelitian Manajemen https://www.researchgate.net/publication/365038890_Metodologi_Penelitian_Manajemen

- Anifa, F. (2023). Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Peran Komunikasi Dalam Peningkatan Komitmen Karyawan Hotel Yusro Jombang Jombang.
- Anggrawan, Ir Anthony, *Pendidikan Implementasi Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 37-46.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Pedoman Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). Strategi Nasional Riset dan Inovasi 2020–2045. Jakarta: BRIN.
- Baiquni, M. (2020). Peran Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Geografi*, 12(01), 224.
- Basri, H. H., Hanun, F., Murtadho, M., & Press, L. (2019). *Indeks integritas siswa SMA dan MA*. Litbangdiklat Press.
- Cahyo, I. S. D. (2023). Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Kinerja Oprasional Dengan Inovasi Produk Dan Inovasi Proses Sebagai Mediasi Pada Perusahaan Konveksi Tekstil Fashion Di Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Cloud, H. (2005). *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Darma Sabri, M. A., Utami, S., & Harmen, H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan*. Syiah Kuala University Press.
- Effrisanti, Y. (2015). Pembelajaran berbasis proyek melalui program magang sebagai upaya peningkatan soft skills mahasiswa. *Eksis: jurnal riset ekonomi dan bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.26533/eksis.v10i1.52>
- Entriza, A. N. (2024). *Manajemen Kurikulum Di Sekolah Islam Terpadu Dalam Mewujudkan Integrasi Ilmu (Studi Kualitatif Di Sd It Nur Hidayah Surakarta)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Fauzi, E., Marweny, E., Firmansyah, I., Adha, M. F., Lisandro, Z., Maharani, P., ... & Sari, R. (2025). Peningkatan Pemahaman Siswa Tentang Integrasi Nasional Melalui Sosialisasi Pencegahan Aksi Tawuran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(2), 91-97.
- Gutama, Wiku Anjampiani, and Nina Oktarina. "Integrasi Kompetensi Hubungan Masyarakat Dalam Sistem Administrasi Perkantoran Yang Efektif." *Bookchapter Administrasi Perkantoran 1* (2025): 175-195.

- Hidayat, A. F. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 943-950
- Ibrahim, Muhammad Buchori, et al. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Imron, A. (2015). *Integrasi Kurikulum Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Islam Di SMP IT Nurul Yaqin Kabupaten Sorong* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Agama Cahyo, I. S. D. (2023). *Pengaruh Manajemen Pengetahuan*
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003." *Pemerintah Republik Indonesia* (2003).
- Inovasi Nasional. (2021). *Panduan Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah*. Jakarta: Kemenristek/BRIN.
- Irayanti, I. (2023). *Integrasi Sosial Masyarakat Majemuk*. PT Arr Rad Pratama.
- Jayanti, Dhiya Ulhaq, And Suripto Suripto. *Restrukturisasi Perangkat Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Restrukturisasi Bappeda Menjadi Baperida Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)*. Diss. Ipdn, 2025.
- Kampusmerdeka.Kemdikbud.go.id. (2022). Tujuan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Diakses pada 10 November 2022, <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/tujuan>
- Katensia, Frumensia, Yosefina Andia Dekrita, and Imanuel Wellem. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka." *Dharma Ekonomi* 31.2 (2024): 102-117.
- Kependudukan, Badan, and Keluarga Berencana Nasional. "BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep." *Metodologi Penelitian Kesehatan* 73 (2023).
- Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Inovasi Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Katensia, F., Dekrita, Y. A., & Wellem, I. (2024). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka. *Dharma Ekonomi*, 31(2), 102-117.
- Kodrat, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kebijakan link and match dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 45–52. Noe, et al. (2019) Pelatihan dan pengembangan yang efektif untuk mempersiapkan individu memasuki dunia kerja dengan memberikan exposure terhadap praktik-praktik bisnis dan manajemen yang actual.

- Masruroh, S. (2021). Konsep dan implementasi kurikulum MBKM (merdeka belajar kampus merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.
- Masram, H., M. Pd MM, and M. M. Mu'ah. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Daya Saing*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Manajemen Sumber Daya Manusia _Membangun Daya Saing - Dr. H. Masram, M.M., M.Pd., Dr. Hj. Mu'ah, M.M., M.Pd.
- Nabilla, Grisviana Diva. *TA: Pengaruh Pengalaman Magang, Literasi Digital, dan Modal Psikologis terhadap Kesiapan Kerja*. Diss. Universitas Dinamika, 2025.
- Noe, et al. (2019) Pelatihan dan pengembangan yang efektif untuk mempersiapkan individu memasuki dunia kerja dengan memberikan exposure terhadap praktik-praktik bisnis dan manajemen yang actual.
- Noviani, L., Ismoyowati, D., Istiqomah, N., Setyawan, A., Mafruhah, I., Rinanto, Y., ... & Perdana, D. N. C. (2024). Penguatan science based policy pada pemanfaatan riset dan inovasi guna mewujudkan daya saing daerah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 179-186.
- Pambudi, Andi Setyo, and Hendra Wahanu Prabandani. "Reformulating Government Regulation Number 39Year 2006 to Promote Integration of Development Control, Satu Data Indonesia, and National Development Risk Management." *Iblam Law Review* 5.3 (2025): 34-50.
- Pakpahan, Andrew Fernando, *et al.* "Metodologi penelitian ilmiah." (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Pudjiastuti, S. R. (2025). *Buku Jejak Integritas: Menapaki Jalan Kehormatan Menuju Hidup Bermakna*. Penerbit Widina.
- Piqriani, Y. N., Yurika, M. A., & Amin, A. (2021). Hakikat Inovasi (Discoveri, Invensi, Inovasi, Dan Modernisasi). *GHAITSA: Islamic Education Journal*, 2(3).
- Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). Inovasi pelayanan pada organisasi publik.
- Romdoni, M., Sawiji, H., & Subarno, A. (2021). Pelaksanaan Program Magang Dunia Usaha Dan Industri Ditinjau Dari Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fkip Uns Tahun 2019. *JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 5(1), 43-54.
- Sepang, Irin Veronica. "Modul pembelajaran SMA sosiologi Kelas XI: integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat." (2020).
- Sutisna, M. I., Adam, M., & Yunus, M. (2024). *Manajemen dan Organisasi*. Syiah Kuala University Press.

- Simon Sara "Laporan Kuliah Kerja Magang Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Investasi Daerah Untuk Mendukung Perencanaan Perekonomian Di Kabupaten Sikks " (2024).
- Sikka, Ekstrem Di Kabupaten. *"Improving Planning Capacity At The Planning And Research And Development Agency (Bapelitbang) In An Effort To Reduce Extreme Poverty In Sikka District* Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan."
(Susetyo, 2020).substansinya mengutamakan praktik di lapangan (link and matcth)
- Simatupang, Elizabeth, and Indrawati Yuhertiana. "Merdeka belajar kampus merdeka terhadap perubahan paradigma pembelajaran pada pendidikan tinggi: Sebuah tinjauan literatur." *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi* 2.2 (2021): 30-38.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Thahir, Baharuddin. "Paradigma dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah." *Jurnal Media Birokrasi* (2019): 175-185.
- Triyono, A. (2021). Dr. Agus Triyono, MSi Buku Ajar Riset Penyiaran (Teori dan Praktek).
- Yuliani, T. (2020). Peran riset dan teknologi dalam meningkatkan daya saing daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 33–48.
- Wijaya, Amara Costania. "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan.
- Wira Atmaja, A. (2022). *Pengaruh Struktur Organisasi Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pt Global Saftindo* (Doctoral dissertation, STIE Malangkececwara).
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.